

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital memiliki 6 (enam) Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2026. Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian Kinerja (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional					
1.1	Indikator 1.1 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	Persentase	9-10%	9-10% ^{c)}	9-10% ^{a)}	100%
1.2	Indikator 1.2 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	Persentase	21,9%	21,9% ^{c)}	21,22% ^{a)}	96,89%
1.3	Indikator 1.3 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	Persentase	13,07%	13,07%	13,28% ^{a)}	101,61%
1.4	Persentase Penyelesaian Inisiasi Gig Economy	Persentase	60%	60% ^{c)}	21,43%	35,72%
1.5	Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri	Persentase	100%	100% ^{c)}	69,99%	69,99%
II	Sasaran Program 2. Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas					
2.1	Indikator 2.1 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	Persentase	8,09% ^{b)}	8,09% ^{b)}	10,49% ^{a)}	77,12%
2.2	Indikator 2.2 Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	Hari	1,6 hari ^{b)}	1,6 hari ^{b) c)}	1,59 hari	100,63%
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Literasi Keuangan	Indeks	60,27	60,27 ^{c)}	60,27 ^{d)}	100%
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4 (Baik)	1 dari 4	1	100%

V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4 (Baik)	3 dari 4	3,43	110%
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas					
6.1	Indikator 6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	92%	40%	45,45%	110%

Keterangan:

a) Nilai merupakan proyeksi capaian

b) Target merupakan nilai maksimal

c) Angka target tahunan

d) Indeks literasi keuangan diperoleh melalui SNLIK yang dilakukan pada semester II sehingga hasil survei baru dapat diketahui pada akhir tahun)

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital pada Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program: Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
----------	--

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional ditunjukkan oleh pencapaian lima indikator kinerja yaitu:

- a.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB
- a.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB
- a.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB
- a.4. Persentase Penyelesaian Inisiasi Gig Economy
- a.5. Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB

Latar Belakang

Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB menjadi indikator penting dalam mencerminkan kemajuan transformasi ekonomi berbasis teknologi di Indonesia. Ekonomi digital meliputi berbagai aktivitas yang didorong oleh teknologi digital, seperti e-commerce, layanan keuangan digital (fintech), aplikasi digital, serta digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti manufaktur. Peningkatan kontribusi ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi yang mendukung, percepatan literasi digital masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pelaku usaha digital. Untuk memastikan capaian yang optimal, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara lintas

kementerian/lembaga. Target ini selaras dengan RPJMN dan Visi Indonesia Digital 2045, serta menjadi ukuran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan potensi ekonomi digital.

Pengukuran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Formula perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Ekonomi Digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)} = \frac{\text{PDB Sektor Ekonomi Digital}}{\text{Total PDB}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.1 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB Tahun 2026 adalah sebesar 9-10%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029. Capaian IKU 1.1 sampai dengan triwulan II 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	Persentase	9-10%*	9-10%**	100% (Memuaskan)

Keterangan:

*) Merupakan target tahunan

**) Angka realisasi merupakan proyeksi

Sampai dengan triwulan II tahun 2026, realisasi masih berupa proyeksi karena metode perhitungan ekonomi digital masih dalam proses penyusunan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Metodologi yang disepakati untuk digunakan yaitu dengan menggunakan kerangka OECD pendekatan berlapis (*layer approach*). Saat ini sedang dilakukan pemetaan tiap layer, termasuk pemetaan KBLI 2025 dan SNA (*System of National Accounts*) 2025. Diperkirakan penyusunan metodologi dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026.

Namun, target tahun 2026 optimis dapat tercapai melihat perkembangan kinerja sistem pembayaran digital di Indonesia yang semakin kuat. Berdasar data Bank Indonesia pada April 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 5,15 miliar transaksi atau meningkat sebesar 42,86% (yoy), seiring dengan semakin luasnya penerimaan dan penggunaan instrumen pembayaran digital di masyarakat. Transaksi melalui layanan mobile banking dan internet banking masing-masing tumbuh sebesar 15,92% (yoy) dan 22,95% (yoy). Di samping itu, transaksi menggunakan QRIS terus mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, yakni sebesar 108,43 perse% (yoy), yang didukung oleh bertambahnya jumlah pengguna dan merchant yang memanfaatkan sistem pembayaran tersebut.

Dari sisi infrastruktur sistem pembayaran, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 490 juta transaksi atau meningkat

46,09% (yoy), dengan nilai transaksi mencapai Rp1.219 triliun pada April 2026. Sementara itu, transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 0,91 juta transaksi, tumbuh 25,72% (yoy), dengan nominal transaksi sebesar Rp17.520 triliun atau meningkat 14,55% (yoy). Adapun dari aspek pengelolaan uang Rupiah, posisi Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada April 2026 mencapai Rp1.301 triliun atau tumbuh 14,61% (yoy), yang mencerminkan tetap tingginya kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai di tengah pesatnya perkembangan transaksi digital.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan dengan berlandaskan pada Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital 2026-2030 yang mencakup penguatan regulasi *e-commerce* termasuk Peraturan Pemerintah (PP) terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pemberdayaan platform *e-commerce* untuk UMKM, dan lainnya maupun sumber lain yang sejalan dengan RPJMN.

Dalam mendukung hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian aktif melakukan koordinasi rutin yang dilakukan dengan melibatkan K/L maupun badan lainnya berupa koordinasi informal terkait metodologi yang digunakan untuk pengukuran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB. Adapun diskusi dilakukan dengan melibatkan Prof. Babacan, dan instansi lainnya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi pengumpulan data dan informasi isu/permasalahan terkait <i>e-commerce</i>	Terlaksana	Koordinasi serta pengumpulan data dan informasi terkait identifikasi isu/permasalahan, serta pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi <i>e-commerce</i> dengan melakukan diskusi bersama Prof. Babacan dari Australia.
2	Koordinasi pembahasan Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	Terlaksana	Koordinasi pembahasan pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB telah dilaksanakan pada 27 Januari 2026 sesuai undangan Nomor PED.04.06/18/D.III.M.EKO N.5/01/2026; 6 April 2026 sesuai undangan Nomor

			PED.04.04/38/D.III.M.EKO N.5/03/2026; 16 April 2026 sesuai undangan Nomor PED.04.04/39/D.III.M.EKO N.5/04/2026.
Triwulan II			
1	Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan terkait e-commerce	Terlaksana	Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan terkait e-commerce telah dilaksanakan.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan koordinasi rutin bersama kementerian/lembaga terkait:

1. Membuat *timeline* target dan rencana kegiatan pembahasan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB.
2. Melakukan koordinasi insentif dengan K/L terkait terhadap capaian volume transaksi *e-commerce*.
3. Melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap daftar periksa (*checklist*) rencana yang telah disusun.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp4.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk perumusan formulasi metodologi yang disebabkan karena terbatasnya anggaran dan kapasitas di kementerian/lembaga terkait, serta dibutuhkan klasifikasi KBLI agar tidak tumpang tindih dan penerapan SNA (*System of National Accounts*) 2025 di Indonesia yang diestimasi paling cepat pada tahun 2029.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka upaya/rekomendasi perbaikan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai seperti pelaksanaan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait serta lembaga *think tank* atau pihak lainnya untuk *benchmarking* dan *capacity building*.

Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB nasional merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian penguatan perdagangan nasional melalui proses sinkronisasi, koordinasi dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Dewan Pengarah memiliki tugas-tugas antara lain:

- A. Merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif;
- B. Menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor;
- C. Menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat yang timbul dalam proses peningkatan ekspor; dan
- D. Mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor.

Dan untuk mendukung pelaksanaan Keppres tersebut, telah disusun Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 416 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional.

Pengukuran kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB bertujuan untuk mengukur kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebagai indikator keberhasilan penguatan perdagangan Indonesia. Formula perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB (\%)} = \frac{\text{Nilai Ekspor Barang dan Jasa}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.2 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB Tahun 2026 adalah sebesar 21,9%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029. Capaian IKU 1.2 sampai dengan triwulan II 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	Persentase	21,9%	21,22%*	96,89%

Keterangan: *) angka realisasi merupakan proyeksi berdasarkan Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB pada triwulan I tahun 2026

Sampai dengan laporan ini disusun, Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Triwulan II Tahun 2026 belum diketahui dikarenakan jadwal rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir Agustus 2026. Data yang disampaikan merupakan proyeksi berdasarkan realisasi pertumbuhan PDB pada Triwulan I Tahun 2026 yang telah dirilis pada bulan Mei 2026.

Adapun realisasi Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 21,22% dengan nilai ekspor barang dan jasa Rp1.258.177,38 miliar dan nilai pendapatan domestik bruto nasional sebesar Rp5.665.930,2 miliar. Dari proyeksi tersebut, angka Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa pada Triwulan II diperkirakan minimal sebesar 21,22%, sehingga kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital diperkirakan mencapai 96,89% yang didapat dari persentase realisasi triwulan I dibanding dengan target triwulan II.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Evaluasi implementasi kebijakan peningkatan ekspor tahun 2025	Terlaksana	Evaluasi implementasi kebijakan peningkatan ekspor dilaksanakan melalui kegiatan rapat: 1. 21 Januari 2026 (Kemenko Perekonomian) 2. 11 Februari 2026 (Kemenko Perekonomian)

2	Koordinasi kebijakan <i>high level meeting</i> peningkatan ekspor untuk komoditas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan	Terlaksana	Koordinasi kebijakan <i>high level meeting</i> peningkatan ekspor dilakukan melalui rapat: 1. 7 Januari 2026 (Zoom) 2. 23 Januari 2026 (Zoom) 3. 29 Januari 2026 (Zoom) 4. 3 Februari 2026 (Zoom) 5. 5 Februari 2026 (Kemenko Perekonomian) 6. 5 Maret 2026 (Bogor) 7. 10 Maret 2026 (Kemenko Perekonomian) 8. 12 Maret 2026 (Kemenko Perekonomian)
Triwulan II			
1	Koordinasi evaluasi implementasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024	Terlaksana	Koordinasi evaluasi implementasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dilaksanakan melalui rapat: 1. 30 April 2026 (Kemendag) 2. 26 Mei 2026 (Kemenkum) 3. 9 Juli 2026 (Kemendag)
2	Koordinasi evaluasi implementasi Permendag Nomor 23 Tahun 2023	Terlaksana	Koordinasi evaluasi implementasi Permendag Nomor 23 Tahun 2023 dilaksanakan melalui rapat: 1. 28 April 2026 (Kemendag) 2. 25 Mei 2026 (Kemenkum) 3. 10 Juni 2026 (Kemendag)

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain juga telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan *Tripartite High-Level Meeting* yang dilaksanakan bersama dengan pimpinan Kementerian Perdagangan RRT (*Ministry of Commerce/MOFCOM*) dan Pemerintah Provinsi Fujian, serta kegiatan *business matching* dan MoU antara pelaku usaha Indonesia dan Tiongkok.
2. Kegiatan Training Seminar on the China-Indonesia "Two Countries, Twin Parks (TCTP)" Cooperation yang didanai oleh Pemerintah RRT, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta diikuti oleh peserta dari Kementerian Keuangan, Badan

Karantina Indonesia, Sekretariat Dewan Nasional KEK, pengelola kawasan yang terlibat TCTP di Indonesia, dan asosiasi usaha.

3. Rapat Kerja KNFP dan Sosialisasi Kepmenko No.613 Tahun 2025 sesuai surat undangan Nomor PED.02.02/13/D.III.M.EKON.3/04/2026.
4. Rapat Koordinasi Progress Kesiapan KEK Tanjung Lesung dalam Kerja Sama TCTP sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/14/D.III.M.EKON.3/04/2026.
5. Rapat *Preparation for the TCTP Seminar, Business Matching, and Memorandum of Understanding (MoU) Signing* sesuai surat undangan Nomor PED.02.02/03/D.III.M.EKON.3/01/2026 dan PED.02.01/15/D.III.M.EKON.3/04/2026 dan PED.02.01/16/D.III.M.EKON.3/04/2026.
6. Rapat Koordinasi Teknis Kurasi proyek kerja sama dalam rangka TCTP dan Identifikasi isu strategis untuk dibahas dalam *High Level Meeting* sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/17/D.III.M.EKON.3/04/2026.
7. Rapat Tim Dashboard dan Penguatan Analisis Perdagangan Internasional Menggunakan Metode GTAP sesuai surat undangan Nomor PED.02.02/18/D.III.M.EKON.3/04/2026. Penyampaian Nota Dinas Rapat Tim PKN atas Rekomendasi Hasil Penyelidikan KKPI Terhadap Pengenaan Perpanjangan BMTP atas Impor Produk Benang Stapel dan BMTP atas Impor Produk Tirai sesuai nota dinas nomor PED.02.03/41/D.III.M.EKON.3/04/2026.
8. Rapat Pembahasan Perkembangan Sistem Informasi Terintegrasi DHE SDA sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/21/D.III.M.EKON.3/05/2026.
9. Rapat Koordinasi Pengeluaran Barang dari KB ke TLDDP sesuai surat undangan Nomor PED.02.03/23/D.III.M.EKON.3/06/2026.
10. Kegiatan *Sharing Session* "Peningkatan Pembiayaan Ekspor untuk Industri Padat Karya" sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/24/D.III.M.EKON.3/06/2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp4.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target sebagai berikut:

1. Pemanfaatan fasilitas perjanjian perdagangan belum optimal.
2. Ketidakpastian kebijakan geopolitik yang memengaruhi

- perdagangan antar negara mitra.
3. Meningkatnya *trade barriers* seperti kebijakan antidumping, subsidi domestik, persyaratan teknis untuk melindungi industrinya.
 4. Beberapa industri masih menghadapi biaya produksi yang relatif tinggi akibat harga energi, bahan baku, serta produktivitas yang belum optimal.
 5. Struktur ekspor Indonesia masih didominasi komoditas berbasis sumber daya alam sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperluas sosialisasi perjanjian perdagangan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh eksportir, serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian perdagangan.
2. Penguatan diplomasi ekonomi untuk membuka akses pasar baru, Penguatan sistem informasi pasar ekspor dan promosi dagang internasional.
3. Memperkuat diplomasi perdagangan melalui WTO maupun FTA, mempercepat penyelesaian sengketa dagang, serta meningkatkan fasilitasi ekspor bagi sektor terdampak.
4. Mendorong modernisasi industri, meningkatkan insentif investasi, memperkuat pengembangan SDM industri, serta memperluas akses pembiayaan ekspor.
5. Mendorong hilirisasi Industri untuk meningkatkan nilai tambah ekspor dan memperluas ekspor produk manufaktur berteknologi menengah dan tinggi, memperkuat insentif investasi industri pengolahan berorientasi ekspor.

1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB

Latar Belakang

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB merupakan persentase dari nilai perdagangan besar dan eceran dibandingkan dengan PDB Nasional secara keseluruhan. Sektor perdagangan besar maupun eceran, merupakan urat nadi perekonomian daerah dan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang krusial. Kinerja sektor ini secara langsung mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah seperti halnya dalam mendorong konsumsi rumah tangga, menjaga kelancaran distribusi barang, serta mendukung stabilitas harga. Pada tahun 2025 TW IV, perdagangan besar dan eceran secara nasional berkontribusi 13,22%.

Pengukuran kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDB bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Formula pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB (%)

$$= \frac{PDB \text{ Sektor Perdagangan Besar dan Eceran}}{PDB \text{ Nasional}} \times 100\%$$

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB merupakan persentase dari nilai perdagangan besar dan eceran dibandingkan dengan PDB Nasional secara keseluruhan. Sektor perdagangan besar maupun eceran, merupakan urat nadi perekonomian daerah dan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang krusial. Kinerja sektor ini secara langsung mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.3 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB Tahun 2026 adalah sebesar 13,07%. Penetapan target ini dilihat dari tren-tren tahun sebelumnya di mana target diharapkan dapat dipertahankan dan stabil sampai akhir tahun. Capaian IKU 1.3 sampai dengan triwulan II 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	Persentase	13,07%	13,28%*	101,61%

Keterangan: *) Angka realisasi merupakan proyeksi berdasarkan Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB pada triwulan I tahun 2026

Sampai dengan laporan ini disusun, Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Triwulan II Tahun 2026 belum diketahui karena jadwal rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir awal Agustus 2026. Data yang disampaikan merupakan proyeksi berdasarkan realisasi pertumbuhan PDB Triwulan I Tahun 2025 yang telah dirilis pada Mei 2026. Merujuk pada realisasi Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 13,28% dan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 13,22%. Dari kedua proyeksi tersebut, angka Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB pada Triwulan IV tahun 2025 diperkirakan dapat mencapai 13,28%, sehingga kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital diperkirakan mencapai 101,61%.

Data yang terdapat pada BPS masih merupakan gabungan antara Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi, Perawatan Mobil, dan Sepeda Motor (Kategori G). Sebagai upaya menjaga validitas dan kredibilitas data, telah dikirimkan permintaan pemisahan data PDB Kategori G1 dan G2 ke BPS, namun data tersebut belum didapat sampai laporan ini disusun.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.3. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Pengumpulan data dan informasi terkait isu/permasalahan pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	Terlaksana	Pengumpulan data dan informasi terkait isu/permasalahan pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan K/L terkait serta asosiasi pelaku usaha.
Triwulan II			
1	Koordinasi kebijakan penyelesaian kendala dalam pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	Terlaksana	Koordinasi kebijakan penyelesaian kendala dalam pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan K/L terkait serta asosiasi pelaku usaha.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp1.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut sebagai berikut:

1. Sebagian pusat perbelanjaan dan toko fisik masih

menghadapi penurunan jumlah pengunjung seiring perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih berbelanja secara daring.

2. Banyaknya produk impor murah di pasar domestik.
3. Meskipun inflasi relatif terkendali, konsumsi rumah tangga masih tumbuh moderat. Kelompok masyarakat berpendapatan menengah cenderung lebih selektif dalam berbelanja, terutama untuk barang nonprimer, sehingga memengaruhi penjualan ritel.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mendorong efisiensi operasional, memperkuat akses pembiayaan UMKM, serta meningkatkan kapasitas manajemen usaha dan inovasi produk.
2. Meningkatkan daya saing produk lokal melalui peningkatan kualitas dan produktivitas, melakukan promosi dan peningkatan daya beli masyarakat melalui Program Belanja Dalam Negeri.
3. Menjaga stabilitas harga dan inflasi, memperkuat penciptaan lapangan kerja, meningkatkan efektivitas perlindungan sosial, serta mendorong program peningkatan konsumsi domestik seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Belanja di Indonesia Aja (BINA), dan Bangga Buatan Indonesia (BBI).

1.4. Persentase Penyelesaian Inisiasi Gig Economy

Latar Belakang

Persentase Penyelesaian Inisiasi *Gig Economy* digunakan untuk mengukur pelaksanaan inisiasi pengembangan *gig economy* melalui program pelatihan dan sertifikasi kompetensi di beberapa lokasi *pilot project*. IKU ini merupakan IKU baru direktif Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, maka perlu adanya pematangan konsep program *gig economy* sebelum pelatihan dilaksanakan untuk keberlanjutan program yang lebih baik. Mitra penyedia pelatihan melibatkan perusahaan teknologi (*tech company*), institusi akademik, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam pengembangan talenta ekonomi digital.

Target lokasi *Pilot Project* tahun 2026 terdiri dari 14 kota, yaitu Makassar, Yogyakarta, Bandung, Medan, Banjarmasin, Lombok, Mataram, Surabaya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Manado, Jayapura, dan Tangerang. Kota-kota tersebut dapat menyesuaikan, namun merupakan daerah yang representatif untuk perkembangan *gig economy* di Indonesia, didorong oleh infrastruktur digital tinggi, populasi Gen Z/milenial, serta tingginya pekerja kreatif dan *freelancer*.

Capaian IKU ini mencerminkan persentase penyelesaian inisiasi *gig economy* minimal di 9 kota *pilot project*. Program ini diharapkan dapat mengembangkan sumber daya manusia

dalam membangun tenaga kerja *gig economy* yang kompeten, adaptif terhadap transformasi digital, serta siap berpartisipasi secara produktif dalam aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Hal ini diharapkan dapat mendukung penguatan kualitas SDM sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang.

Formula pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyelesaian Inisiasi Gig Economy} = (\text{Realisasi daerah inisiasi Gig Economy} / \text{Target daerah inisiasi Gig Economy}) * 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.4 Persentase Penyelesaian Inisiasi Gig Economy Tahun 2026 adalah sebesar 60%. Capaian IKU 1.4 sampai dengan triwulan II 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 1.4. Persentase Penyelesaian Inisiasi Gig Economy	Persentase	60%*	21,43%	35,72%

*Angka merupakan target tahunan

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.4. Persentase Penyelesaian Inisiasi Gig Economy			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi persiapan peluncuran Program Pelatihan Gig Economy di lokasi pilot project	Terlaksana	Koordinasi persiapan peluncuran Program Pelatihan Gig Economy di lokasi pilot project terlaksana sesuai undangan nomor KWU.06.01/5/D.III.M. EKON.1/1/2026 tanggal 5 Januari 2026; PED.04.02/9/D.III.M. EKON.1/01/2026 tanggal 6 Januari 2026;

			PED.04.02/20/D.III.M .EKON.1/01/2026 tanggal 9 Januari 2026; PED.04.02/34/D.III.M .EKON.1/01/2026 tanggal 19 Januari 2026; PED.04/45/D.III.M.E KON.1/01/2026 tanggal 23 Januari 2026; PED.04.02/58/D.III.M .EKON.1/01/2026 tanggal 26 Januari 2026; PED.04/78/D.III.M.E KON.1/02/2026 tanggal 3 Februari 2026; PED.04.02/100/D.III. M.EKON.1/02/2026 tanggal 18 Februari 2026.
2	Pelaksanaan launching dan pelatihan program Gen Z: Gig Economy & AI Competition di lokasi pilot project	Terlaksana	Pelaksanaan launching dan pelatihan program Gen Z: Gig Economy & AI Competition di lokasi pilot project telah dilakukan di Jawa Barat (Kota Bandung), D.I.Yogyakarta, dan DKI Jakarta
Triwulan II			
1	Pelaksanaan program pelatihan Gig Economy di lokasi pilot project	Terlaksana	Pelaksanaan program pelatihan Gig Economy di lokasi pilot project telah dilakukan di Jawa Barat (Kota Bandung), D.I.Yogyakarta, dan DKI Jakarta

Realisasi pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan telah berjalan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan. Sebagai cascading dari IKU ini, pada tingkat eselon II juga telah dilaksanakan pelatihan secara rutin setiap bulan bekerjasama dengan Pemda DKI Jakarta di Jakarta Creative Hub.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program Gig Economy mampu meningkatkan kapasitas talenta digital melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis industri yang melibatkan perguruan tinggi, SMK, serta Jakarta Creative Hub sebagai lokasi pilot project. Keberhasilan tersebut juga mencerminkan efektivitas model kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia digital yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Realisasi pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan telah berjalan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh koordinasi yang intensif dengan Google Indonesia, perguruan tinggi, sekolah vokasi, pemerintah daerah, serta berbagai mitra pelaksana sehingga proses rekrutmen peserta, pelaksanaan pelatihan, monitoring, hingga penetapan penerima beasiswa dapat terlaksana secara efektif. Ke depan, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital akan terus memperluas pelaksanaan program Gig Economy melalui penyelenggaraan batch berikutnya dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan, tingkat penyelesaian peserta, serta relevansi materi pelatihan terhadap kebutuhan industri digital.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk

pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat mekanisme monitoring dan pendampingan peserta secara berkala bersama institusi mitra guna meningkatkan tingkat penyelesaian pelatihan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan mitra pelaksana, termasuk Google Indonesia, perguruan tinggi, SMK, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan batch berikutnya agar proses pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, dan pelaporan dapat berjalan lebih efektif;
3. Melakukan evaluasi terhadap capaian setiap institusi mitra sebagai dasar penyempurnaan mekanisme rekrutmen peserta, pendampingan, serta penentuan kuota pada pelaksanaan Program Gig Economy berikutnya.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp1.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaiki Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut sebagai berikut:

1. Tingkat komitmen dan konsistensi peserta dalam menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan masih bervariasi di setiap institusi mitra, sehingga tingkat penyelesaian antar peserta belum merata.
2. Pelaksanaan pelatihan yang melibatkan berbagai perguruan tinggi, SMK, pemerintah daerah, dan mitra industri memerlukan koordinasi yang intensif, khususnya dalam proses pendaftaran peserta, pemantauan progres pembelajaran, serta konsolidasi data penyelesaian pelatihan dan sertifikasi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada

Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbalkan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Diperlukan penegasan komitmen kepada peserta pada saat pendaftaran program.
2. Diperlukan suatu *database* agar peserta dapat dimonitoring secara individu.

1.5. Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri merupakan IKU baru merupakan IKU baru direktif Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang berkontribusi terhadap penguatan nilai perdagangan dalam negeri melalui optimalisasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pasar domestik, penguatan distribusi barang, serta stimulasi konsumsi produk dalam negeri.

Adapun program belanja nasional yang direncanakan untuk terselenggara pada tahun 2026 berjumlah 5 kegiatan yaitu:

1. BINA Lebaran
2. Friday Mubarak
3. BINA Indonesia Great Sale
4. Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS)
5. EPIC Sale

Kegiatan akan diselenggarakan oleh asosiasi terkait yaitu HIPINDO (Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia), APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), dan idEA (Indonesia, *E-Commerce Association*) dengan berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian

Capaian efektivitas menunjukkan keberhasilan koordinasi lintas sektor, kesiapan pelaku usaha, serta respons positif masyarakat terhadap kampanye belanja nasional. Dengan demikian, indikator ini berperan penting sebagai dasar perumusan kebijakan lanjutan guna memperkuat ekosistem perdagangan dalam negeri dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Formula pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri} = \frac{(\text{Realisasi nilai transaksi program belanja nasional} / \text{Target nilai transaksi program belanja nasional yang direncanakan})}{* 100\%}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.5 Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri Tahun 2026 adalah sebesar 100%. Capaian IKU

1.5 sampai dengan triwulan II 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 1.5. Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri	Persentase	100%*	69,99%	69,99%

*Angka merupakan target tahunan

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.5. Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi persiapan pelaksanaan Program Belanja Negara triwulan I	Terlaksana	Koordinasi persiapan pelaksanaan Program Belanja Negara triwulan I telah dilaksanakan sesuai dengan surat nomor PED.01.01/01/D.III.M.EK ON.2/01/2026
Triwulan II			
1	Koordinasi persiapan pelaksanaan Program Belanja Dalam Negeri triwulan II	Terlaksana	Koordinasi persiapan pelaksanaan Program Belanja Dalam Negeri triwulan II telah dilaksanakan sesuai surat nomor PED.01.01/14/D.III.M.EK ON.2/05/2026 dan PED.01.01/17/D.III.M.EK ON.2/06/2026.
2	Evaluasi pelaksanaan Program Belanja Dalam Negeri semester I	Terlaksana	Evaluasi pelaksanaan Program Belanja Dalam Negeri semester I telah dilaksanakan sesuai surat nomor PED.01.01/07/D.III.M.EK ON.2/03/2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring,

sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp1.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Menurunnya daya beli masyarakat.
2. Masih belum optimalnya promosi program belanja nasional.

Berdasarkan kendala-kendala juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi pelaksanaan program belanja dengan diskon yang diharapkan dapat menarik minat belanja.
2. Koordinasi promosi program belanja nasional di kanal resmi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

2

Sasaran Program: Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

- 2.1. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB
- 2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan

2.1. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB

Latar Belakang

Biaya transportasi adalah biaya yang mencakup biaya transportasi primer dan sekunder menggunakan seluruh moda (darat, laut, udara). Biaya transportasi primer meliputi biaya perpindahan pengisian dari pabrik atau pusat distribusi ke pabrik atau pusat distribusi lain, dan pengangkutan inbound atas perpindahan barang jadi yang dibeli ke pabrik atau pusat distribusi. Biaya transportasi sekunder termasuk pembayaran kepada pengangkut, tunjangan penjemputan, peralatan truk atau kereta api dan biaya operasional.

Biaya transportasi terdiri dari:

- Biaya Jasa Angkutan Darat Selain Angkutan Rel
- Biaya Jasa Penunjang Angkutan
- Biaya Jasa Angkutan Laut
- Biaya Jasa Angkutan Udara
- Biaya Jasa Pos dan Kurir
- Biaya Jasa Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- Jasa Angkutan Rel

Pengukuran biaya transportasi logistik terhadap PDB bertujuan memberikan gambaran kenaikan atau penurunan biaya transportasi logistik. Formula

pengukuran adalah sebagai berikut:

Biaya Transportasi Logistik Terhadap PDB

$$= (\text{Nilai biaya transportasi logistik} / \text{nilai PDB}) * 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 2.1 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB Tahun 2025 adalah sebesar 8,09%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029. Capaian IKU 2.1 sampai dengan triwulan II 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target* TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 2.1. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	Persentase	8,09%*	10,49%**	77,12%

Keterangan:

**) Target merupakan nilai maksimal*

***) Angka realisasi merupakan proyeksi*

Target biaya transportasi logistik terhadap PDB tahun 2026 adalah 8,09% yang merupakan nilai maksimal yang perlu dicapai, dimana semakin rendah biaya logistik berarti semakin baik kinerjanya.

Sampai dengan laporan ini disusun, Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB triwulan II tahun 2026 belum diketahui mengingat rilis data PDB Nasional Lapangan Usaha triwulan II belum terbit dan diperkirakan akan rilis pada awal Agustus 2026. Proyeksi triwulan II tahun 2026 menggunakan realisasi triwulan I tahun 2026.

Biaya transportasi logistik/Biaya Logistik Nasional (BLN) terdiri dari biaya transportasi logistik darat dan laut yang perhitungannya dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan sudah diumumkan secara tertutup pada triwulan IV 2025 untuk BLN 2022 dengan menggunakan basis IO 2016, sedangkan untuk BLN 2023-2024 menggunakan basis IO 2020.

Realisasi triwulan II didorong oleh penyelesaian RPerpres Penguatan Logistik Nasional yang berisikan 3 (tiga) strategi yang menyasar pada peningkatan efektivitas, efisiensi, keandalan, dan kolaborasi lintas sektor pemangku kepentingan logistik. Oleh karena itu, Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB pada Triwulan II tahun 2026 diperkirakan minimal dapat mencapai 10,49%, sehingga kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital diperkirakan mencapai 77,12%.

Pada tahun 2026, fokus kebijakan pengembangan logistik nasional yaitu Kebijakan Penguatan Logistik Nasional melalui percepatan penetapan dan pelaksanaan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional, dengan pilar strategi sebagai berikut:

1. penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang Logistik;
2. penguatan integrasi dan digitalisasi Layanan Logistik; dan
3. peningkatan daya saing sumber daya manusia dan Penyedia Jasa

Logistik

Percepatan penetapan dan pelaksanaan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional diarahkan untuk dapat menurunkan persentase biaya Logistik nasional terhadap produk domestik bruto sesuai target dalam dokumen perencanaan nasional serta peningkatan kinerja Logistik nasional dalam indikator kinerja Logistik global.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku pemrakarsa RPerpres Penguatan Logistik Nasional terus melakukan langkah-langkah koordinatif dalam rangka memenuhi fokus yang telah ditetapkan untuk tahun 2026, melalui antara lain penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan rapat-rapat koordinasi teknis dalam rangka penyusunan RPerpres tersebut. Sejauh ini tiga menteri, yakni Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan, serta Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan dan menyampaikan surat resmi kepada Menteri Sekretaris Negara, sementara proses finalisasi masih menunggu paraf dari Menteri Perhubungan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait digitalisasi dan integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i>	Terlaksana	Koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait digitalisasi dan integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i> telah dilaksanakan melalui Rapat Pembahasan Tindak Lanjut <i>Domestic Working Group</i> untuk ASEAN <i>Common Qualification</i> pada Profesi Warehouse Operator dan Freight Forwarder pada tanggal 14 Januari 2026.
Triwulan II			
1	Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan terkait digitalisasi dan integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i>	Terlaksana	Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan terkait digitalisasi dan integrasi layanan logistik serta peningkatan kapasitas profesi <i>freight forwarder</i> dan <i>warehouse controller</i> telah dilaksanakan pada tanggal 9 dan 13 April 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja diantaranya adalah:

1. Rapat Pembahasan Penyusunan Kualifikasi Profesi *Warehouse Operator* dan *Freight Forwarder* Nasional tanggal 4 dan 10 Februari 2026.
2. *Capacity Building Workshop for the AKFTA Common Occupational Standards Frameworks for Freight Forwarders and Warehouse Controllers* tanggal 6 maret 2026.
3. Rapat Pembahasan *Pending Matters* Rencana Aksi RPerpres Penguatan Logistik Nasional tanggal 25 Februari, 5 Maret, 19 Maret 2026.
4. FGD Pembahasan Strategi Meningkatkan Pemanfaatan Moda Pengangkutan Barang Berbasis Rel tanggal 16 April 2026.
5. *Upgrading* Kualifikasi SDM Sektor Pergudangan Logistik tanggal 22 Juni 2026
6. Rapat Koordinasi Program UMKM Logistik tanggal 4 dan 20 Mei 2026.
7. Rapat Dialog Penguatan Peran Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Logistik di Jepang tanggal 27 April 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp3.000.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut sebagai berikut:

1. Keterlambatan rilis data perhitungan Biaya Logistik Nasional (BLN) oleh Kementerian PPN/Bappenas sehingga menghambat proses analisis dan penyusunan rekomendasi penurunan BLN.
2. Penetapan RPerpres Penguatan Logistik Nasional masih menunggu penandatanganan Presiden sehingga pelaksanaan rencana aksi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka dilakukan beberapa upaya tindak lanjut:

1. Penyediaan data BLN untuk kebutuhan analisis dan penyusunan rekomendasi dilakukan dengan proyeksi internal menggunakan data PDB harga berlaku triwulanan yang dirilis oleh BPS.
2. Pelaksanaan digitalisasi logistik dan peningkatan daya saing SDM dan PJL logistik yang menjadi tanggung jawab Kemenko Perekonomian pada strategi di dalam RPerpres Penguatan Logistik Nasional tetap dijalankan sesuai dengan mandat di dalam RPJMN 2025-2029.

2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan

Latar Belakang

Waktu perputaran (*Turn Around Time/TAT*) di pelabuhan yang difokuskan untuk kegiatan ekspor-impor adalah waktu yang dibutuhkan sebuah kapal untuk melakukan satu siklus lengkap di pelabuhan, mulai dari bersandar, bongkar muat, hingga akhirnya berlayar kembali. Waktu perputaran yang efisien sangat penting bagi efisiensi rantai pasokan dan kinerja pelabuhan secara

keseluruhan. Waktu perputaran yang lama dapat menyebabkan penumpukan kapal di pelabuhan, keterlambatan pengiriman barang, dan peningkatan biaya logistik.

Pelabuhan yang dijadikan sampel perhitungan terdiri dari Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Tanjung Perak (Surabaya). Kedua pelabuhan tersebut dipilih karena merupakan pelabuhan tersibuk dan terbesar yang menjadi barometer perekonomian Indonesia.

Pengukuran rata-rata waktu perputaran di pelabuhan bertujuan memberikan gambaran kinerja pelabuhan dalam memperlancar kegiatan arus lalu lintas transportasi angkutan laut sebagai penunjang kegiatan ekspor dan impor secara umum. Formula pengukuran adalah sebagai berikut:

Waktu Perputaran di Pelabuhan (TT)

$$= (\text{Jumlah Waktu Keberangkatan Aktual} - \text{Waktu Tiba Aktual}) : \text{Jumlah Kapal}$$

Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok

$$= \Sigma \text{Rata-rata TT Seluruh Bulan} : 12$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 2.2 Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan Tahun 2026 adalah sebesar 1,6 Hari. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029.

Hingga triwulan II tahun 2026, Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan yang telah terealisasi sebesar 1,59 Hari atau mencapai 100,63% dari target tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	Persentase	1,6 Hari*	1,59 Hari	100,63%

*) Target merupakan nilai maksimal (satuan hari = 24 jam)

Target rata-rata waktu perputaran di pelabuhan tahun 2026 adalah 1,6 hari yang merupakan nilai maksimal yang perlu dicapai, dimana semakin cepat waktu perputaran berarti semakin baik kinerjanya. Realisasi triwulan I tahun 2026 adalah 1,59 hari dari target 1,6 hari atau berhasil mencapai kinerja 100,63%.

Pada tahun 2026, fokus kebijakan pengembangan logistik nasional yaitu Kebijakan Peningkatan Kinerja Pelabuhan dan Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Kebijakan Pembangunan Dashboard Kinerja Logistik Nasional, serta Kebijakan Penyusunan RPerpres Penguatan Logistik Nasional.

Kemenko Perekonomian menginisiasi pembangunan Dashboard Kinerja Logistik Nasional dengan asistensi dari Bank Dunia guna memantau kinerja logistik domestik maupun internasional dari sisi efisiensi melalui dimensi waktu yang dikembangkan mengikuti kaidah *best practice international* (pendekatan *Supply Chain Tracking Data/Logistic Performance Index*) serta untuk mendukung pembuatan kebijakan di bidang logistik dalam rangka menurunkan biaya logistik

nasional terhadap PDB.

Indikator kinerja logistik internasional yang akan mengikuti indikator dalam perhitungan *Logistics Performance Index* (LPI) oleh Bank Dunia, meliputi: (i) *Port indicator: Ship Turnaround Time at Port*; (ii) *Container indicator: Container Dwell Time Import & Export*; (iii) *Container Indicator: Consolidated Dwell Time Import & Export*; (v) *Postal indicator: Postal Delivery Time Import*; (vi) *Airport indicator: Aviation Dwell Time Import*;

Indikator kinerja logistik domestik meliputi: (i) *Port indicator: Ship Turnaround Time Domestic*; (ii) *Inter-Island indicator: Container Dwell Time Outbound & Inbound*.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.2. Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait peningkatan produktivitas alat bongkar muat di terminal peti kemas pelabuhan.	Terlaksana	Koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait peningkatan produktivitas alat bongkar muat di terminal peti kemas pelabuhan telah dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Penyepakatan Definisi dan Ruang Lingkup Rata-Rata Waktu Perputaran Kapal di Pelabuhan (<i>Ship Turn Around Time at Port/TAT</i>) pada tanggal 4 Maret 2026.
Triwulan II			
1	Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan dan penyusunan strategi peningkatan kinerja bongkar muat peti kemas ekspor impor di pelabuhan	Terlaksana	Koordinasi penyelesaian isu/permasalahan dan penyusunan strategi peningkatan kinerja bongkar muat peti kemas ekspor impor di pelabuhan telah dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Pembahasan Definisi dan Ruang Lingkup Rata-Rata Waktu Perputaran Kapal di Pelabuhan (<i>Ship Turn Around Time at port/STT</i>) pada tanggal 27 April 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja diantaranya adalah:

1. Rapat persiapan Focus Group Discussion Road to ALFI CONFEX tanggal 12 Juni 2026.
2. Audiensi dengan Putral UGM tanggal 23 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga

proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp3.000.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target yaitu keterlambatan respon dari k/l yang telah diberikan mandat dalam rapat untuk dapat menetapkan pelabuhan utama, menyelaraskan definisi STT, dan menyediakan data STT untuk dapat dijadikan landasan penyusunan analisis dan rekomendasi peningkatan kinerja bongkar muat di pelabuhan.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yaitu pelaksanaan koordinasi berkala dengan k/l yang telah diberikan mandat pada rapat untuk percepatan kesepakatan definisi dan penyediaan data STT, serta melakukan monitoring evaluasi langsung ke pelabuhan Tanjung Priok dan Perak untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan.

3

Sasaran Program: Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu IKU 3.1 Indeks Literasi Keuangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Indeks Literasi Keuangan Latar Belakang

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Literasi keuangan diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu (i) pengetahuan, (ii) keterampilan, (iii) keyakinan, (iv) sikap, dan (v) perilaku.

Penggunaan akun/layanan keuangan formal adalah penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan, seperti jumlah rekening tabungan dan kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal, jumlah rekening uang elektronik terdaftar (*registered*) pada penerbit uang elektronik, persentase kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal. Literasi keuangan yang memadai mendorong meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu, serta perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan. Untuk mengukur indeks literasi keuangan konvensional dilakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, tingkat

literasi keuangan nasional pada triwulan IV tahun 2025 menunjukkan 66,64%.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 3.1 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2026 adalah sebesar 60,27. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029. Adapun realisasi capaian Triwulan II 2026 pengukuran capaian Indeks literasi keuangan akan diperoleh melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). SNLIK akan diumumkan pada Semester II Tahun 2026, sehingga hasil survei SNLIK baru dapat diketahui pada akhir tahun 2026, maka dari itu ketercapaian target pada triwulan II belum dapat diketahui dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 3.1. Indeks Literasi Keuangan	Persentase	60,27	60,27*	100%

*) angka merupakan proyeksi (indeks literasi keuangan diperoleh melalui SNLIK yang dilakukan pada semester II Tahun 2026).

Pada triwulan II tahun 2026 belum dapat diketahui berapa realisasinya karena indeks literasi keuangan diperoleh melalui SNLIK yang dilakukan pada semester II Tahun 2026 sehingga hasil survei baru dapat diketahui pada akhir tahun.

Realisasi indeks literasi keuangan tidak terlepas dari berbagai upaya dan konvergensi program yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pekerja migran, perempuan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), masyarakat di daerah 3T, pelajar/santri, dan pemuda sebagaimana kelompok sasaran yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Upaya dan program tersebut dilakukan melalui edukasi keuangan yang turut melibatkan partisipasi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), pemberdayaan hak properti masyarakat yang terintegrasi, intermediasi fungsi lembaga keuangan dengan *branchless office* dan digitalisasi keuangan, elektronifikasi program pemerintah bagi kelompok rentan dan pelaku UMK melalui program perlindungan sosial dan subsidi pemerintah, penguatan perlindungan konsumen sektor keuangan dan pelaksanaan *market conduct*, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan infrastruktur dasar dan teknologi informasi yang mendukung literasi keuangan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.1. Indeks Literasi Keuangan
Triwulan I

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait peningkatan indeks literasi keuangan konvensional dan syariah bagi segmen prioritas	Terlaksana	Koordinasi Awal Peningkatan Literasi Keuangan Konvensional bagi Segmen Prioritas: a. Rapat Persiapan Penyusunan Bahan Laporan SNKI Tahun 2025 pada tanggal 6 Januari 2026 (Pokja II, Sekretariat DNKI), 7 Januari 2026 (Pokja I dan III), 9 Januari 2026 (Pokja VI dan VII), 13 Januari 2026 (Pokja IV dan V). b. Rapat Koordinasi terkait Tindak Lanjut FGD Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Peningkatan Ekonomi Rakyat (PINTAR) dengan OJK pada tanggal 5 Februari 2026. c. Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan "Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan" pada tanggal 2 Maret 2026.
2	Peluncuran AKSI KLIK dan Gerakan AKU BISA SEJAHTREA untuk perkuat literasi dan inklusi keuangan	Terlaksana	Peluncuran AKSI KLIK dan Gerakan AKU BISA SEJAHTREA untuk perkuat literasi dan inklusi keuangan telah dilaksanakan pada 6 Maret 2026.

Triwulan II

1	Koordinasi dan monitoring pelaksanaan peningkatan literasi keuangan konvensional dan syariah bagi segmen prioritas pada Semester 1	Terlaksana	1. Koordinasi Awal Peningkatan Literasi Keuangan Konvensional bagi Segmen Prioritas: a. Rapat Program kerjasama dengan BMGF terkait Pemberdayaan UMKM pada tanggal 28 April 2026. b. FGD Konsultasi Stakeholder Penguatan Program Inklusi Keuangan menuju Kesejahteraan Keuangan pada tanggal 18 Mei 2026. 2. Sosialisasi dan Edukasi terkait Literasi Keuangan Konvensional: a. Rapat Persiapan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Berbasis Integrated Farming Komoditas Nilam pada tanggal 15-17 April 2026. b. Strive Learning Network: Launching dan Diseminasi Dokumen Pembelajaran dari Program Mastercard Strive Indonesia pada tanggal 4 Mei 2026.
---	--	------------	---

2	Evaluasi pilot project PINTAR di Kabupaten Kuningan	Terlaksana	Tindak Lanjut Pilot Project Program PINTAR dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026.
---	---	------------	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan koordinasi rutin bersama Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Komnas Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Adapun upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Audiensi program Promise II Impact dengan ILO pada tanggal 27 April 2026.
2. Bilateral meeting dengan Direktur Jenderal Peraturan-Perundangan Kementerian Hukum pada tanggal 28 April 2026.
3. Open Ceremony Indo Livestock 2026 Expo & Forum pada tanggal 17 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp1.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaiki Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara tingkat inklusi dan literasi keuangan dimana banyak masyarakat sudah memiliki produk keuangan misalnya rekening bank, tetapi belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengelola produk tersebut secara bijak. Begitupun dengan rendahnya literasi pada sektor non-bank. Literasi masyarakat masih didominasi oleh produk perbankan sehingga masyarakat gagal memanfaatkan produk non-bank untuk proteksi (asuransi) dan pengembangan aset (pasar modal), sehingga ketahanan finansial jangka panjang rumah tangga menjadi rapuh. Selain itu, terdapat kesenjangan yang cukup jelas juga antara inklusi keuangan di perkotaan dengan perdesaan. Masyarakat di perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan keuangan formal, seperti perbankan dan pembiayaan, sementara masyarakat di perdesaan masih menghadapi berbagai keterbatasan akses. Selanjutnya, lemahnya sinergi program antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yaitu diperlukan intensifikasi penyelenggaraan edukasi, sosialisasi dan literasi keuangan bagi kelompok sasaran; inisiatif program yang secara spesifik menyasar kepada masyarakat desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan lokal; serta penguatan DNKI menjadi DNKK.

4

Sasaran Program: Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu IKU 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap dinamika perekonomian global, khususnya pada sektor perniagaan dan ekonomi digital, diperlukan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan melalui proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terintegrasi. Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputy Bidang koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perniagaan dan ekonomi digital.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah:

- (1) Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan
- (2) Pengembangan Ekspor Nasional
- (3) Penguatan Ekosistem Logistik Nasional
- (4) Pengembangan Ekonomi Digital
- (5) Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan

Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputy dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputy dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai Indeks efektifitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputy dan dihitung dengan formulasi berikut:

Indeks efektifitas SKP

$$= 5\sqrt{(SKP\ AD\ 1 \times SKP\ AD\ 2 \times SKP\ AD\ 3 \times SKP\ AD\ 4 \times SKP\ AD\ 5)}$$

Nilai Akhir Indeks efektifitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke **skala**, dengan rincian sebagai berikut:

- Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100
- Efektif (3), rentang nilai 81 - 90
- Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80
- Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 3 dari 4 (balk) yang diperoleh dari data setiap Keasdepan dan dihitung berdasar rumus.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi **sebesar 1 dengan capaian penilaian 42,44% atau 100% dari target triwulan II atau 33,33% dari target tahun 2026** dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
-------------------------	--------	----------------	--------------	-----------------	-----------

IKU 4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	3 dari 4	1 dari 4	1*	100%
--	------------	----------	----------	----	------

Catatan: Nilai belum merupakan indeks akhir, capaian Penilaian Efektivitas SKP sampai triwulan I 2026 adalah 42,44%

Penilaian Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital diperoleh dari akar lima dari Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di unit Eselon II: Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga; Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor; Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional; Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital; serta Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan. Adapun realisasi Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan pada masing-masing Asdep sebagai dasar perhitungan, yaitu:

No	Unit Kerja Eselon II	Persentase Efektivitas SKP (%)
1	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	40
2	Asisten Deputi Fasilitas Dalam Negeri dan Pengembangan Ekspor	45
3	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional	45
4	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	42,5
5	Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	40
Penilaian Efektivitas SKP sampai dengan Triwulan II		42,44

Pada Triwulan II Tahun 2026, Penilaian Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi adalah 42,44%. Hal ini dikarenakan sebagian besar Koordinasi,

Sinkronisasi dan Pengendalian yang dilaksanakan di unit Eselon III Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital masih berada pada **tahap kedua** yaitu Penyusunan Alternatif Rekomendasi.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait kegiatan peningkatan ekspor dan pengendalian impor	Terlaksana	Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait kegiatan peningkatan ekspor dan pengendalian impor dilaksanakan melalui: a. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Optimalisasi Peran FTA dalam Rangka Mendukung Peningkatan Ekspor Nasional sesuai surat undangan Nomor PED.02.01/09/D.III.M.EKON.3/02/2026 dan PED.02.01/10/D.III.M.EKON.3/02/2026. b. Penyampaian Surat Surat Sesmenko Perekonomian a.n. Menko Perekonomian perihal Pertimbangan atas Pengenaan BMAD terhadap Impor Kertas Dupleks asal Korea, Malaysia, dan Taiwan sesuai surat nomor PI.02.03/13/M.EKON/02/2026. c. Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Upaya Penguatan Efektivitas Kebijakan <i>Trade Remedies</i> sesuai nomor undangan PED.02.03/32/D.III.M.EKON/02/2026. d. Penyampaian Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan RPermendag Impor sesuai nomor undangan PED.02.01/35/D.III.M.EKON/02/2026. e. Penyampaian Nota Dinas Laporan Rapat Kajian Arah Pengembangan Industri TPT sesuai nota dinas nomor

			PED.02.03/24/D.III.M.EKON/02/2026. f. Penyampalan Surat Sesmenko Perekonomian a.n. Menko Perekonomian perihal Pertimbangan atas Penyelidikan KADI terkait Pengenaan BMAD terhadap HRC asal Wuhan Iron and Steel, Co., Ltd. sesuai surat nomor PI.02.03/22/M.EKON/02/2026.
2	Persiapan koordinasi terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, iklim usaha, inovasi, dan investasi	Terlaksana	Persiapan koordinasi terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi dilaksanakan melalui: a. Kegiatan Pembekalan Nasional Talenta Semikonduktor 2026 tanggal 3 Maret 2026. b. Rapat Koordinasi Persiapan Posisi Indonesia untuk pertemuan ASEAN DEFA putaran ke-16, tanggal 9 Januari 2026. c. Launching Program Penguatan Ekosistem Gig Economy di Bandung tanggal 30 Januari 2026.
3	Koordinasi identifikasi permasalahan terkait peningkatan literasi keuangan	Terlaksana	Koordinasi identifikasi permasalahan terkait peningkatan literasi keuangan dilaksanakan melalui: a. Rapat Pembahasan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada tanggal 5 Januari 2026. b. Rapat Program Kerja Kelembagaan Kesejahteraan Keuangan Pembahasan Penguatan Program Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (Pokja 1) pada 29 Januari 2026.
Triwulan II			
1	Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait peningkatan produktivitas alat bongkat muat di terminal peti kemas pelabuhan	Terlaksana	Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait peningkatan produktivitas alat bongkat muat di terminal peti kemas pelabuhan dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Pembahasan Definisi dan Ruang Lingkup Rata-Rata Waktu Perputaran Kapal di Pelabuhan (<i>Ship Turn Around Time at port/STT</i>) pada tanggal 27 April 2026.
2	Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait standarisasi dan pengawasan perdagangan	Terlaksana	Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait standarisasi dan pengawasan perdagangan dilaksanakan melalui rapat koordinasi tindak lanjut aduan yang

			masuk dalam kanal <i>Debottlenecking</i> Satgas P3M-PPE (Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi).
3	Koordinasi dan sinkronisasi terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, iklim usaha, inovasi, dan investasi	Terlaksana	Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Pengembangan Ekosistem Semikonduktor tanggal 23 Juni 2026.
4	Koordinasi penyusunan alternatif kebijakan peningkatan literasi keuangan	Terlaksana	Koordinasi penyusunan alternatif kebijakan peningkatan literasi keuangan dilaksanakan melalui FGD Pembentukan Kelembagaan Kesejahteraan Keuangan pada tanggal 29 April 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan *Dashboard Monitoring* Ekspor dan Impor sesuai dengan surat undangan nomor PED.02.02/02/D.III.M.EKON.3/01/2026.
2. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Teknis Pengembangan *Dashboard Monitoring* Ekspor dan Impor tanggal 11 Februari 2026, sesuai surat undangan Nomor PED.02.02/08/D.III.M.EKON.3/02/2026.
3. Rapat Pembahasan Naskah Pertimbangan ASEAN-China FTA 3.0 tanggal 29 April dan 7 Mei 2026.
4. Rapat persiapan penyusunan Keppres dan Perpres DNKK tanggal 5 Mei 2026.
5. Rapat penyusunan Keppres dan Perpres DNKK tanggal 7, 12, 13 Mei 2026.
6. Rapat penyusunan Perpres DNKK tanggal 26 Mei, 29 Mei, 2 Juni, 9 Juni, 19 Juni, 26 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp4.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu:

1. Perubahan sebagian besar nomenklatur pada K/L yang menjadi pengampu dalam Buku Putih Stranas Ekonomi Digital 2030, sehingga perlu dilakukan pemetaan kembali sesuai kondisi saat ini.
2. Masih terdapat perbedaan tingkat kesiapan dan kepentingan antar negara anggota ASEAN dalam menyepakati sejumlah isu strategis ekonomi digital, sehingga proses perundingan memerlukan pembahasan yang lebih intensif untuk mencapai konsensus.
3. Waktu penyusunan regulasi yang bertambah lama akibat adanya

perubahan arah kebijakan yang awalnya disusun RPP Komnas sesuai UU No. 4 Tahun 2023 menjadi DNKK sesuai arahan Presiden.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka beberapa upaya tindak lanjut antara lain:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsolidasi dengan Kementerian/Lembaga.
2. Berpartisipasi aktif dalam rangkaian pertemuan ASEAN DEFA, termasuk Negotiating Committee (NC), Legal Experts Meeting (LEM), dan capacity building, guna memperkuat kapasitas negosiator serta mempercepat penyelesaian isu-isu yang masih tertunda.
3. Perubahan regulasi yang awalnya RPP Komnas LIK menjadi DNKK memerlukan koordinasi dan pembahasan yang rutin.

5

Sasaran Program: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu IKU 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Mengukur indikator tingkat kepuasan penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Puas; (2) Tidak Puas; (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian

$$= (\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 1} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 4}) / 5$$

Catatan:

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 5.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 3 dari 4 (Baik). Adapun target triwulan II 2026 adalah sebesar 3 dari 4 (Baik).

Pada triwulan II tahun 2026, Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi sebesar 3,43 atau mencapai 110% dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
-------------------------	--------	--------------	-----------------	-----------

IKU 5.1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4 (baik)	3,43 (baik)	110%
---	--------	--------------------	----------------	------

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital diperoleh dari rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di unit: Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga; Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor; Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional; Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital; serta Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan. Adapun Indeks Kepuasan Layanan pada masing-masing Asdep sebagai dasar perhitungan, yaitu:

No	Unit Kerja Eselon 2	Indeks Kepuasan Semester I
1	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	3,35 (Puas)
2	Asisten Deputi Fasilitas Dalam Negeri dan Pengembangan Ekspor	3 (Puas)
3	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional	3,29 (Puas)
4	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	3,74 (Sangat Puas)
5	Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	3,76 (Sangat Puas)
Rata-rata		3,43 (Puas)

Pada triwulan II tahun 2026, Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital **diperoleh nilai rata-rata Indeks 3,43 (Puas)** dengan jumlah responden di unit eselon II masing-masing sebanyak 30 orang yang tersebar di Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Google, IBM, Meta, Huawei, dan Microsoft.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026

sebagai berikut:

5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Memberikan arahan tindak lanjut hasil Survei Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II Tahun 2025	Terlaksana	Arahan Tindak Lanjut Hasil Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I telah dilaksanakan melalui rapat pimpinan yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.
2	Memberikan arahan penyusunan kuesioner pengukuran Survei Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Terlaksana	Arahan penyusunan kuesioner pengukuran survei kepuasan layannya Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I telah dilakukan kepada keasdepan di lingkup Deputi bahwa penyusunan kuesioner dilakukan secara daring agar lebih efektif dan efisien.
Triwulan II			
1	Memberikan arahan pelaksanaan Survei Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I Tahun 2026	Terlaksana	Arahan pelaksanaan Survei Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I Tahun 2026 telah dilaksanakan secara daring.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp4.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai pada Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu:

1. Kebutuhan data dan informasi lintas sektor yang semakin meningkat, sementara ketersediaan data dari berbagai kementerian/lembaga dan instansi terkait belum seluruhnya terintegrasi secara real-time.
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil survei kepuasan pengguna layanan sebagai dasar penyempurnaan layanan koordinasi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya tindak lanjut :

1. Memperkuat koordinasi pertukaran data, mengoptimalkan pembentukan *dashboard* ekspor impor, serta meningkatkan penggunaan analisis berbasis data dalam penyusunan rekomendasi kebijakan.
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil survei kepuasan, menyusun rencana aksi perbaikan layanan berdasarkan umpan balik pengguna, serta meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyempurnaan standar layanan koordinasi.

6

Sasaran Program: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Latar Belakang
Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada Peraturan Sekretaris Kementerian.

Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditargetkan sebanyak 12 rencana aksi, sebagai berikut:

1. Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (ZI) (1 kegiatan pada triwulan IV);
2. Nilai SAKIP (2 kegiatan pada triwulan I, 1 kegiatan pada triwulan II, 1 kegiatan pada triwulan III, 2 kegiatan pada triwulan IV);
3. Tingkat Digitalisasi Arsip (1 kegiatan pada masing-masing triwulan I-IV).

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital:

% Pelaksanaan Renaksi RB

$$= \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 92%. Adapun target triwulan II 2026 adalah sebesar 92%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi sebesar 45,45% atau mencapai 110% dari target triwulan II tahun 2026 atau 49,40 dari target tahun 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	40%	45,45%	110% (Memuaskan)

Pencapaian kinerja IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah sebesar 49,40% dari target 92% pada tahun 2026. Pemenuhan target menunjukkan Renaksi RB yang dilaksanakan telah memenuhi seluruh Renaksi RB yang dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja
Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi			Penyusunan draft Perjanjian Kinerja tahun 2026
			Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			
Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja	Terlaksana	Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan melalui <i>coaching clinic</i> Lingkup Kedeputan III pembahasan penyusunan perjanjian kinerja pada tanggal 21 Januari 2026 dan penetapan dilaksanakan secara individu pada tanggal 6 Maret 2026.
2	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan telah dilaksanakan pada Triwulan-I 2026.
3	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI telah dilaksanakan melalui Nota Dinas dan Sosialisasi SRIKANDI.
Triwulan II			
1	Penyusunan laporan kinerja triwulanan	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan telah dilaksanakan pada Triwulan II 2026.
2	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI telah dilaksanakan melalui Sosialisasi SRIKANDI.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan beberapa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual/daring, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp4.500.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan harapan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai pada Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu:

1. Internalisasi budaya kerja dan implementasi Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada hasil masih perlu diperkuat, sehingga pelaksanaan sebagian kegiatan masih berfokus pada pemenuhan administrasi.
2. Beberapa rencana aksi Reformasi Birokrasi memerlukan koordinasi lintas unit kerja, sehingga penyelesaian beberapa target memerlukan waktu yang lebih panjang.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2026, maka dilakukan beberapa upaya tindak lanjut :

1. Meningkatkan sosialisasi Reformasi Birokrasi, memperkuat peran Agen Perubahan, serta mendorong implementasi rencana aksi yang berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan.
2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan rencana aksi melalui rapat evaluasi berkala, memperkuat komunikasi dengan unit terkait, serta memastikan setiap penanggung jawab melaksanakan tindak lanjut sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Jakarta, Juli 2026

 Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan
dan Ekonomi Digital



Ali Murtopo Simbolon